

**UPAYA POLRES TEGAL KOTA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG PALSU**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Melati Nur Khayati

NPM: 5117500076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**UPAYA KEPOLISIAN TEGAL KOTA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG PALSU**

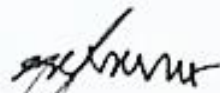
MELATI NUR KIHAYATI

NPM 5117500076

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN 0606066001

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702

Mengetahui
Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA KEPOLISIAN TEGAL KOTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG PALSU

MELATI NUR KHAYATI

NPM 5117500076

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Juli 2021

Penguji I



Dr. Hamidah Abdurrahman, S.H., M.Hum.
NIDN 0022105601

Penguji II



Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

Pembimbing I



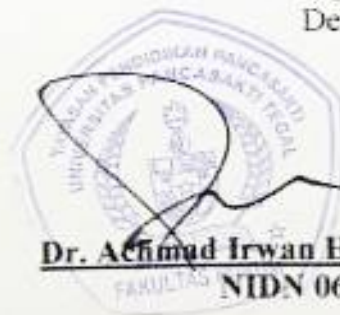
Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN 0606066001

Pembimbing II



Fajar Dian Arvani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702

Mengetahui
Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melati Nur Khayati
NPM : 5117500076
Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 31 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN TEGAL KOTA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN MATA UANG PALSU.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2021

Yang menyatakan



Melati Nur Khayati

Abstrak

Uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar menukar yang dapat diterima secara umum. Mengenai definisi uang rupiah dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia uang adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui ilmu pengetahuan upaya kepolisian tegal kota dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah polres tegal kota. (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah polres tegal kota.

Jenis penelitian adalah Penelitian kepustakaan yang merupakan data yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dokumen dan sumber-sumber lain. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak data skunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan kepolisian kota tegal berhasil dalam menangani tindak pidana pengedaran uang palsu sehingga tidak ada lagi penemuan kasus baru dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana mengedarkan uang palsu sudah cukup baik dan untuk kenda-kendala yang dihadapi kepolisian kota tegal sulitnya untuk mencari pelaku yang merupakan pelaku pendatang dari luar kota tegal.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Pemalsuan, Mata Uang, Kejahatan.

Abstract

Money is generally defined as a generally accepted medium of exchange. Regarding the definition of rupiah currency in Article 2 paragraph (1) of Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, money is a legal tender in the territory of the Republic of Indonesia.

This study aims (1) to determine the knowledge of the efforts of the Tegal City Police in tackling the crime of currency counterfeiting in the Tegal City Police District area. (2) to know the obstacles faced by the police in tackling the crime of counterfeiting currency in the area of the Tegal city police station.

The type of research is library research which is data that can be obtained from books, scientific works, internet, documents and other sources. This research includes library research because the data used is more secondary data.

The results of this study show that the police of the city of Tegal are successful in dealing with the crime of circulating counterfeit money so that there are no more new cases found and the efforts made by the police in tackling the crime of circulating counterfeit money are good enough and for the obstacles faced by the police of the city of Tegal it is difficult to find perpetrators who are immigrants from outside the city of Tegal.

Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: forgery, currency, crime.

MOTTO

“Gunakanlah Kesempatan di Masa Mudamu Agar Kau Tak Menyesal
Di Kemudian Hari”.

(Melati Nur Khayati)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan do'a semangat dalam menyusun skripsi ini.
2. Semua Keluargaku, yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Rika Fadilah, Dinda Avany, Nur Faoziah dan teman-temanku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai gelar sarjana.
4. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H.,M.H dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H.
5. Almamater tercinta UPS Tegal.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis samapikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Tony Haryadi,. M.H.selakuWakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin, S.H.,M.H selakuWakil Dekan III Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Muhammad Wildan, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H.,M.HumselakuDosen Pembimbing I, Ibu Fajar Dian Aryani,S.H.,M.H. selakuDosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisamenyelesaikan studi Strata 1. mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt, sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11

E.	Tinjauan Pustaka.....	12
F.	Metode Penelitian	19
G.	Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....		23
A.	Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidik dalam Penyelidikan	23
B.	Tindak Pidana	30
C.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Uang Palsu.....	40
D.	Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
A.	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Di Wilayah Polres Tegal Kota	56
B.	Kendala yang di Hadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang di Wilayah Polres Tegal Kota.....	64
BAB IV PENUTUP.....		69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran	70
Daftar Pustaka		71
Lampiran		76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		81

Daftar Tabel

Tabel 1. Latar belakang Penanganan Kasus	5
Tabel 2. Perbandingan dengan Jurnal lain.....	17
Tabel 3 Data Penanganan Kasus Baik yang Sudah ditangani mapun yang Belum di Tangani Pihak Kepolisian	56

Daftar Gambar

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Pasar Randu Gunting	76
Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Pasar Kejambon.....	77
Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Pasar Pagi	78
Gambar 4. Wawancara dengan Polres Tegal Kota.....	79
Gambar 5. Surat Hasil Penelitian Polres Tegal Kota	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman yang semakin pesat, setiap negara pastinya menuntut untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor supaya dapat mengikuti laju pembangunan dunia internasional, tidak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, dengan harapan mampu bersaing dan sejajar dengan negara-negara yang lain. Berdasarkan hal ini, Indonesia membentuk pemerintahan untuk menyelenggarakan pembangunan. Pembangunan Nasional mempunyai banyak aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan.

Diantara aspek dan dimensi itu, pembangunan ekonomi adalah suatu pembangunan yang paling terlihat karena dampak dari kelangsungan sangat terasa dalam kehidupan manusia yaitu mengenai kebutuhan dalam sehari-hari.¹ Dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi diperlukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan perekonomian baik perdagangan barang dan jasa maupun hal-hal yang berkaitan dengan bidang moneter, serta meningkatkan dan mempertahankan kestabilan perekonomian nasional.

¹ Ayu Alifiandri Z., *Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2015, hlm. 1.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut diatas, adalah semestinya apabila segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diupayakan dengan seksama sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasinya. dalam pembangunan ekonomi, uang dapat memiliki peran dalam mengatasi perekonomian yang memudahkan dalam pertukaran barang-barang dalam perdagangan untuk menggantikan dengan cara barter.

Uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar menukar yang dapat diterima secara umum. Mengenai definisi uang rupiah dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah alat pembayaran yang sah diwilayah Republik Indonesia. Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh orang umum ataupun masyarakat penduduk dunia sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran sehingga dengan adanya keberadaan uang lebih mudah dalam bertransaksi jika dibandingkan dengan melalui sistem barter, tidak efisien dan kurang cocok untuk digunakan sistem perekonomian modern karena masyarakat membutuhkan yang keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia sehari-hari, uang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.²

²Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Suponyono, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Semarang*”, *Jurnal Law Form*, Volume 11, Nomor 2, 2015, hlm. 158.

Pemerintah menyadari pentingnya uang sebagai alat pembayaran yang sah yang sifatnya umum dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Namun mengingat bahwa tugas-tugas yang diemban pemerintah sangat luas, maka pemerintah memberikan tugas ini kepada lembaga yang bersifat independen dan kuat untuk dapat melaksanakannya. Maka pemerintah menunjukan suatu lembaga untuk mengurus dalam masalah mencetak uang yaitu melalui Bank Sentral Indonesia yang memperoleh mandat dari negara guna melaksanakan tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan demikian diharapkan nantinya benar-benar pemerintahlah satu-satunya pemegang otoritas dalam penciptaan uang.³

Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang menyebutkan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, dimana mekanisme perekonomian menggunakan barang dan jasa, semua perekonomian yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat tukar guna memperlancarkan suatu tujuan⁴. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian meningkatkan produktifitas dan kemakmuran. Seseorang yang memiliki uang dapat dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkan, seperti halnya: pembelian barang dan jasa, pembayaran utang dan

³Ayu Alifiandri Zainal, *Op.Cit*, hlm. 3.

⁴ Iswardono S.P., *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 2004, hlm. 3.

bahkan digunakan untuk menimbun kekayaan sehingga uang dapat dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang.

Namun dengan banyaknya orang yang berlomba-lomba mendapatkan uang justru malah mendorong munculnya berbagai kejahatan tindak pidana yang baru seperti munculnya-munculnya kejahatan *cybercrime*, *moneylaundering*, uang palsu, kejahatan perbankan dan lain sebagainya apalagi dengan dibantu dengan banyaknya berbagai teknologi yang canggih yang sangat mudah untuk membantu dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.⁵ Manusia cenderung mencari cara-cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan meskipun cara-cara yang dilakukan mengakibatkan selalu bertentangan dengan hukum dalam menggunakan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana/ jalan yang dapat digunakan dan sepanjang ada tujuan untuk dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kejahatan jenis baru akan selalu ada.

Munculnya teknologi yang semakin canggih seperti mesin printer semakin sulit untuk diungkapkan bahwa uang yang didapat merupakan uang palsu karena hampir sangat mirip jika dilihat dari berat kertasnya dan tanda air. apalagi bagi perkembangan masyarakat dengan dibantunya kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam pola pikirnya justru lebih memanfaatkan kepandaianya untuk melakukan perbuatan pidana. Timbulnya berbagai macam jenis kejahatan ini menunjukkan kurangnya etika

⁵Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Suponyono., *Op.Cit*, hlm.158.

dan moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang. Misalnya kasus-kasus yang diedarkan diberbagai wilayah di tegal kota yang dapat meresahkan masyarakat. Pada kasus ini ada beberapa kasus baik yang sudah tertangani pihak kepolisian maupun yang belum tertangani pihak kepolisian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kasus tersebut sebagai berikut.

Tabel Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan uang

Data kasus uang palsu 5 tahun terakhir

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Crime Total	-	1	1	1	-
2.	Jumlah tersangka	-	1	3	2	-
3.	Jumlah barang bukti -Upal Rp.	-	1 lembar	723 lembar	16 lembar	-

Berdasarkan Kasus-kasus diatas dengan jumlah kasus yang sangat sedikit ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan kasus kriminal mengenai tindak pidana mengedarkan uang palsu karena aspirasi dari pihak masyarakat seperti pasar tradisional saling mengedukasi mengenai ciri-ciri uang rupiah sehingga tidak terjadi penemuan kasus baru ditambah dengan zaman yang semakin canggih banyak masyarakat mempunyai alat untuk mendeteksi uang rupiah apabila terjadi kecurigaan terhadap orang yang mengedarkan atau yang membeli⁶. namun ada juga masyarakat menemukan uang palsu yang sengaja tidak mau melapor kepada kepolisian dikarenakan

⁶Wawancara dengan Maskuri, Kepala Pasar Pagi, di Tegal Kota, Tanggal 24 Februari 2021 Jam 10.24-11.00 WIB.

dengan jumlah uang palsu yang sedikit dan keenggan masyarakat untuk memperpanjang masalah melalui jalur hukum untuk tersangkanya hanya dilakukan 1 orang⁷.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan hasil pengamatan langsung dari data di Polres Tegal Kota terdapat sebanyak 2 kasus yang sudah tertangani dari rentang tahun 2016-2020 yaitu tahun 2018 yang bertempat umum disalah satu jalan lingkaran utara (Jalingkut) dan tahun 2019 untuk kasus kedua disalah satu tempat umum dipasar pagi. sedangkan tahun 2017 kasus yang belum diselesaikan oleh penyidik yaitu disalah satu tempat umum juga dipasar langon. bahwa upaya yang dilakukan kepolisian terhadap pengedaran uang palsu di Tegal Kota berhasil ditangani sehingga tidak ada penemuan kasus uang palsu di Tegal Kota per tahun 2020.

Kasus-kasus tersebut terbongkar dari laporan-laporan masyarakat yang mendapatkan uang palsu dari pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. mengenai kasus ini modus dari pelaku biasanya mengedarkan uang di pasar tradisional, toko-toko kecil atau warung kelontong yang masih minim alat pendeteksi uang palsu. pedagang-pedagang tradisional menjadi sasaran yang mudah didapat dari para pelaku apalagi yang sudah tua. para pedagang cenderung tidak mengetahui perbedaan uang asli dengan palsu. Atas kejadian tersebut masyarakat merasa dirugikan dan melapor kejadian tersebut saat tim resmob saat sedang berpatroli. perbuatan yang dilakukan terdakwa

⁷Wawancara dengan Untung Susanto, Kepala Pasar Langon, di Tegal Kota, Tanggal 24 Februari 2021 Jam 12.31-13.23.

sebagaimana dimaksud diatur dan diancam dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Besarnya jumlah uang palsu yang beredar di masyarakat akan membawa pengaruh yang cukup signifikansi bagi kestabilan perekonomian negara.

Banyak masyarakat yang tidak tau ciri-ciri mata uang palsu yang menyebabkan mereka menjadi korban akibat ulah pelaku yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana atau yang disebut kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum dalam arti formil (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang) merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat.

Berdasarkan dari kasus yang sudah dijelaskan diatas maka peranan polri dalam menanggulangi tindak pidana mata uang palsu perlu diterapkan agar masyarakat umum lebih aman dari ancaman kejahatan dan dapat menekankan angka ata jumlah kejahatan mengenai mata uang palsu. uang palsu dapat pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa: *“Terhadap tindak pidana kejahatan mata uang dalam dewasa ini sangat merajalela dan berskala besar yang dapat menyebabkan keresahan terhadap masyarakat terutama dalam kejahatan pemalsuan uang yang berdampak pada kestabilan kondisi perekonomian negara”*.

Tindak pidana pemalsuan uang sangat berdampak dengan ketidakpercayaan masyarakat dalam sistem pembayaran membuat masyarakat umum ragu dalam menerima uang tunai dalam transaksi. Adapun pengaturan tentang pemalsuan uang dalam KUHP pasal 244 dan pasal 245 KUHP yang menyatakan: *“Barang siapa yang sengaja mengedarkan atau memalsukan mata uang yang sengaja diedarkan dan mengakui sebagai mata uang asli dapat diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun”*.

Tindak Pidana Pengedaran Uang palsu dalam Pasal 245 KUHP yang menyatakan: *“Barang siapa yang sengaja mengedarkan mata uang yang dikeluarkan oleh bank sebagai mata uang asli, padahal ditiru atau dipalsukan sendiri, ataupun barang siapa yang menyimpan keindonesia, mata uang dan uang kertas dengan maksud menyuruh mengedarkan sebagai mata uang asli, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.

Demikian dalam pasal diatas kita harus lebih waspada dan teliti dalam bertransaksi uang apabila terjadi keraguan dalam menerima uang sebaiknya melaporkan kepada pihak yang berwajib. karena tugas dari pihak berwajib itu memberi pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi kejahatan tindak pidana. Ada ketentuan dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang :

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.

2. Setiap orang dilarang menyembunyikan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Secara umum pemalsuan mata uang adalah suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu. Mengenai perkembangan kedepan selain ada idealisme lembaga dan kinerja kepolisian yang diminta masyarakat, sebagai perkembangan potensi masyarakat tersebut diatas kepolisian menyesuaikan diri dengan irama kemauan politik internal maupun eksternal. Isu HAM akan terus bergayut diantara tugas-tugas kepolisian, bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat baru, canggih dan menggunakan teknologi modern, sementara yang bersifat tradisonal tetap masih ada prosedur hukum akan tetap dipegang teguh dalam mengatasi keadaan itu, meskipun beberapa hal diindonesia masih ada kekosongan hukum, hal itu dilakukan sampai dengan terwujudnya cita-cita masyarakat dalam wadah indonesia baru berdasarkan pancasila.

Apalagi kepolisian republik Indonesia telah berubah wajah langsung dibawah presiden berdasarkan Kepres Nomor 89 tahun 2000 tanggal 1 juli 2002. Agar mampu sebagai alat penegak hukum yang mahir terampil, dan

berwibawa bagi setiap anggota polri wajib tahu dan mampu menerapkan hukum yang mengatur tentang tugas dan wewenang badan-badan kepolisian tersebut dan hukum yang mengatur tersebut adalah “hukum kepolisian”. Maka dari pada itu upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana uang palsu. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

⁸ David D. Oscar (ed), *hukum kepolisian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm.4.

Berdasarkan adanya kasus tersebut maka alasan penulis dalam membuat penelitian ini dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN TEGAL KOTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG PALSU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang diwilayah Polres Tegal Kota?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang diwilayah Polres Tegal Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang diwilayah Polres TegalKota .
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang diwilayah Polres TegalKota.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wawasan khususnya kepada penulis dan mahasiswa lain mengenai cara menanggulangi tindak pidana pengedaran mata uang palsu dan dapat menambah bahan referensi masukan untuk penelitian selanjutnya tentang tindak pidana pengedaran uang palsu, dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum universitas pancasakti tegal.

2. Manfaat Praktis

Bagi penegak hukum, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi polri sebagai bagian penegak hukum diindonesia yang menangani tindak pidana mata uang palsu, memberantas kejahatan mengedarkan mata uang palsu khususnya dalam penukaran yang terjadi dalam bank, agar masyarakat lebih tau dan waspada agar tidak terulang kejadian tersebut, serta agar pihak kepolisian dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana mengedarkan mata uang palsu. Bagi masyarakat, agar lebih berhati hati dalam menukarkan uang karena semakin berkembangnya teknologi akan semakin banyak orang untuk melakukan aksi kejahatan dengan berbagai cara.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian TegalKota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu”, baik dalam bentuk skripsi maupun penelitian lainnya sudah banyak dilakukan. Untuk

memberikan gambaran posisi penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut penulis ilustrasikan tiga penelitian terkait, antara lain:

1. Dewi Astini dan Miranda Sari, 2019, “Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu”. Penelitian ini berisi tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu dilihat dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu dalam pasal 245 KUHP. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu yaitu berupa upaya *preventif* (pencegahan) dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai mata uang. dan upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan dengan melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan dan putusan Hakim yang telah dibuat dengan melaksanakan penegakkan hukum tanpa pandang bulu.⁹
2. Ayu aliviandrizaenal, 2015, “*Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 Dan 245 KUHP*”. Penelitian ini berisi mengenai peranan bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu yaitu Usaha yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menanggulangi

⁹ Dewi Astini, Miranda Sari, “Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu”, *Serambi Akademica*, Volume 7, Nomor 3, 2019, hlm. 4.

peredaran uang palsu di Indonesia berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP ada dua cara, yaitu secara Preventif dan secara Represif. Secara Preventif dilakukan dengan meningkatkan teknik pembuatan uang sehingga sulit untuk dipalsukan, melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah, dan melakukan kerjasama dengan institusi terkait membentuk Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu), yang terdiri dari BIN (Badan Inteligensi Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Sedangkan Secara Represif Bank Indonesia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu dengan melakukan penyelidikan dan penindakan.¹⁰

3. Ronald F. C. Sipayung, 2016, “Analisis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. Penelitian ini berisi peran polri dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang adalah Peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan *penalpolicy* maupun *non penalpolicy*.

Pendekatan *penalpolicy* yang dilakukan oleh Polri diartikan sebagai tindakan represif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas

¹⁰*Op.Cit*, hlm. 47.

toleransi. Polri melakukan tindakan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan serta penyelesaian perkara. Pendekatan *non penalpolicy* yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.¹¹

4. Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Suponyono, 2015, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang”. Penelitian ini berisi tentang Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang yang berlaku saat ini antara lain: KUHP mengatur dalam Pasal 244 - 251, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur dalam Pasal 33 – 38, Di negara asing seperti: Jepang (Pasal 148 - 153), Denmark (Pasal 166 - 170) dan Kanada (Pasal 448 - 462).

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang yang akan datang sebenarnya sudah diupayakan melalui penyusunan RUU KUHP, namun berdasarkan hasil perbandingan dengan KUHP Negara Jepang, Denmark dan Kanada ternyata masih terdapat kekurangan substansi hukum, diantaranya: definisi pemalsuan uang, pengaturan mengenai penyertaan

¹¹Ronald F. C. Sipayung, *et al.*, “Analisis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Usu Law Jurnal*, Volume 4, Nomor 3, 2016, hlm. 13.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 460 KUHP Kanada, perbuatan memalsu uang elektronik, pengaturan mengenai larangan penyampaian dimuka umum terhadap bahan/peralatan yang digunakan untuk membuat uang dan dari segi struktur hukum dengan peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum. Selain upaya *penal* tersebut, diperlukan upaya lain yaitu *non penal* (ekonomi, politik, sosial dan budaya).¹²

5. Agus Arif Wijayanto, 2017, “Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai Kejahatan pemalsuan uang di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari Pemerintah maupun aparat penegak hukum. Selain itu masyarakat juga perlu diberikan edukasi dan pengetahuan tentang cara membedakan uang standar Indonesia dengan uang bukan standar Indonesia guna mencegah masyarakat menjadi korban dari kejahatan pemalsuan uang.

Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa ‘Setiap yang dengan maksud sebagaimana dalam bunyi pasal 26 ayat (1) bertujuan memalsukan uang rupiah dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)’. Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor

¹²Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Soponyono, *Op.Cit*, hlm.11.

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37.¹³

Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian penulis diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai “Upaya Polres TegalKota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu”.

**Tabel Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan uang
Data kasus uang palsu 5 tahun terakhir**

N	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Crime Total	-	1	1	1	-
2	Jumlah tersangka	-	1	3	2	-
3	Jumlah barang bukti -Upal Rp.	-	1 lembar	723 lembar	- 16 lembar	-

Mengenai data pada tabel di atas bahwa penemuan data kasus penanganan uang palsu di tegalkota tidak menunjukkan adanya peningkatan kriminal, setelah penulis melakukan pengamatan didalam masyarakat dari 5 tahun terakhir ini yakni tahun 2016 untuk “*crime total*” berjumlah 0 kasus, tahun 2017 “*crime total*” berjumlah 1 kasus dengan jumlah tersangka 1 orang, tahun 2018 “*crime total*” berjumlah 1 kasus dengan jumlah tersangka 3 orang, Tahun 2019 “*crime total*” berjumlah 1 kasus dengan jumlah tersangka 2 orang, dan pada tahun 2020 kasus tindak pidana “*crime total*” berjumlah 0.

¹³Agus Arif Wijayanto, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonsia*, Makassar: Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung, 2017, hlm.897.

Adapun jumlah untuk barang bukti: Uang palsu rupiah pada tahun 2017 sebanyak 1 lembar, tahun 2018 sebanyak 723 lembar, pada tahun 2019 sebanyak 16 lembar.

Kasus-kasus diatas dengan jumlah kasus yang sangat sedikit ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan kasus kriminal mengenai tindak pidana mengedarkan uang palsu karena aspirasi dari pihak masyarakat seperti pasar tradisional saling mengedukasi mengenai ciri-ciri uang rupiah sehingga tidak terjadi penemuan kasus baru ditambah dengan zaman yang semakin canggih banyak masyarakat mempunyai alat untuk mendeteksi uang rupiah apabila terjadi kecurigaan terhadap orang yang mengedarkan atau yang membeli¹⁴. tetapi ada juga masyarakat menemukan uang palsu yang sengaja tidak mau melapor kepada kepolisian dikarenakan dengan jumlah uang palsu yang sedikit dan keenggan masyarakat untuk memperpanjang masalah melalui jalur hukum untuk tersangkanya hanya dilakukan 1 orang¹⁵.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan hasil pengamatan langsung dari data di Polres Tegal Kota terdapat sebanyak 2 kasus yang sudah tertangani dari rentang tahun 2016-2020 yaitu tahun 2018 yang bertempat umum disalah satu jalan lingkaran utara (Jalingkut) dan tahun 2019 untuk kasus kedua disalah satu tempat umum dipasar pagi. sedangkan tahun 2017 kasus yang belum diselesaikan oleh penyidik yaitu disalah satu tempat umum juga dipasar langon. bahwa upaya yang dilakukan kepolisian terhadap

¹⁴Wawancara dengan Maskuri, Kepala Pasar Pagi, di Tegal Kota, Tanggal 24 Februari 2021 Jam 10.24-11.00 WIB

¹⁵Wawancara dengan Untung Susanto, Kepala Pasar Langon, di Tegal Kota, Tanggal 24 Februari 2021 Jam 12.31-13.23.WIB.

pengedaran uang palsu ditegal kota berhasil ditangani sehingga tidak ada penemuan kasus uang palsu ditegalkota per tahun 2020.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan yang merupakan data yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dokumen dan sumber-sumber lain. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak data skunder.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan penulis menggunakan pendekatan normatif- empiris yaitu penelitian hukum tentang implementasi ketentuan hukum normatif ‘undang-undang’ secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. implementasi ketentuan hukum normatif (in abstracto) pada peristiwa hukum tertentu sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi¹⁷.

3. Sumber Data

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis yaitu:

¹⁶Burhan Ashshoka, Dalam Adinda Rahma Aprilia, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.96.

¹⁷Ibid., Hlm.98.

- a. Bahan Hukum Primeryaitu:data yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu polres tegal kota, kepala pasar pagi, kepala pasar kejambon, kepala pasar randu gunting, kepala pasar langon.
- b. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi yang belum diformalkan yang mencakup semua dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal hukum yangterdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, terdiri dari: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Strandar Operasional Prosedur Pengorganisasian.
 - 2) Bahan hukum skunder : buku-buku hukum, kamus hukum, termasuk skripsi dan junal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan sesuai dengan penelitian tersebut¹⁸.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya surat kabar, internet, maupun dari hasil analisis penelitian.¹⁹

¹⁸KhairulRazak Ritonga, *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetakan dan PengedaranUang Palsu*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, Hlm.13.

¹⁹*Op.Cit.*, hlm.6.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu: Obsevasikepusatakaan. Studi kepustakaan suatu pengumpulan data dngan cara mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, untuk memperoleh data skunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.yakni dalam cara-cara penanggulangan pengedaran uang palsu yang dilakukan dalam kepolisian²⁰.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan undang-undang dan kitab undang-undang hukum pidana, seta norma-norma dalam masyarakat.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

²⁰*Ibid.*,

²¹Zainuddin Ali Dalam, Khairul Razak Ritonga, *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetakan dan Pengedaran Uang Palsu*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, Hlm.13.

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengemukakan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian antara lain: Pengertian Kewenangan Penyidik dalam Penyelidikan, Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Uang Palsu,, Tinjauan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan matauang diwilayah Polres Tegal Kota dan Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang diwilayah Polres Tegal Kota.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran penulis

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidik dalam Penyelidikan.

1. Pengertian Penyidikan

Istilah polisi berasal dari bahasa latin yaitu *politia*, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi *police* (Inggris), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam perkara kriminal²².

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²³ di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)dibedakan antara penyelidik dengan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan.²⁴

²²Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: *USU Press*, 2009, hlm. 40

²³Andi Muhammad Sofyan, Abd.Asis, dalam Khairul Razak Ritonga, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: *Balebat Dedikasi Prima*, hlm.83.

²⁴Ruslan Renggong dalam Khairul Razak Ritonga, *Hukum Pidana Khusus* Jakarta: *Kencana*, halaman 80.

Sedangkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan dan/atau upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sehingga hal ini mulai proses pembuatan suatu laporan polisi, penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang-barang bukti (P-21) sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah dalam rangka penegakkan hukum.

Penyidikan adalah untuk menunjukan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta dan adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Pada Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya²⁵.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakkan hukum tindak pidana selanjutnya. pelaksanaan penyidikan yang baik sangat menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya akan memberikan suatu kemudahan bagi hakim untuk mencari/menemukan kebenaran materi dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang Kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut berguna dengan baik serta membawa efek baik bagi masyarakat luas dan serta untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum agar terbinanya suatu ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi Hak Asasi Manusia terlaksana.²⁶

2. Proses Dan Tahapan Penyidikan

²⁵Khairul Razak Ritonga, *Op.Cit*, ., Hlm.17.

²⁶Andi Munawarman dalam Meta Kristina Ginting *et al*, Sejarah Singkat Polri, <http://HukumOnline.com/hg/narasi/2014/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. Diakses pada tanggal 1 agustus 2020

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindakan pidana dimana dalam Pasal1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan suatu keterangan-keterangan untuk;

- a. Tindak Pidana yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- 1) Penyidikan
- 2) Penindakan;
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan dan Pemeriksaan
 - f. Saksi

- g. Ahli
- h. Tersangka
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara:
 - a. Pembuatan resume
 - b. Penyusunan berkas perkara
 - c. Penyerahan berkas perkara

Maka dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud sebagai penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-

undang sebagai penyidik.²⁷ Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.²⁸

Adapun pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²⁹ Jadi, laporan adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang bewenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindak lanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan/penyidikan).³⁰ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang dapat diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Tata Cara melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 170 KUHAP sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut padal Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan

²⁷*Ibid.*, hlm.19.

²⁸Khairul Razak Ritonga Dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm. 386.

²⁹Andi Muhammad, Abd Asis, *Op.Cit.*, hlm.73.

³⁰*Loc. Cit.*,

yang diperlukan. Penyidika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta, atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawab wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

2. Penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
4. Dalam hal tindak pidana telah selesai diselidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada

penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.³¹

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.³²

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

³¹*ibid*

³²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses, Kamis, Juli 2021, Pukul 18.36 WIB.

Istilah tindak pidana dipakai dengan terjemahan istilah *strafbaarfeit* atau *delict* tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah suatu bentuk kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. dalam penelitian ini ada beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* istilah, yakni:

Moeljatno, mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang membuat aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman hukuman yang berupa pidana dan bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.”. Sedangkan Martiman Prodjoamidjojo mengemukakan ”suatu perbuatan yang diatur didalam suatu negara yang memiliki aturan-aturan hukum dan

barang siapa yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana”.

Menurut Pompe mengemukakan bahwa delik merupakan suatu pelanggaran norma yang dibuat dengan kesengajaan ataupun dibuat dengan tidak kesengajaan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Soedarto mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikatnya tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.³³

Simons mengemukakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang namun dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang memuat rumusan undang-undang yang dapat dihukum.³⁴

Dari beberapa literatur-literatur diatas bahwa makna tindak pidana merupakan suatu hukuman untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas,

³³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2012, hlm. 4.

³⁴ Roeslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dalam Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2012, hlm.22.

asas yang menentukan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nullapoenasinepraevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *vonfeurbach*, sarjana hukum pidana Jerman.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Tidak boleh berlaku surut dalam ketentuanaturan-aturan hukum pidana

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan *dolus* dan kealpaan *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan *schuldyang* dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang

bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.³⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang dihukum berupa sanksi pidana, maka Moeljatno memisahkan antara *criminalact* dan *criminalresponsibility* yang menjadi unsur tindak pidana. Menurut moeljatno hanya lah unsur-unsur yang melekat pada *criminalact* (perbuatan yang dapat dipidana). sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. unsur-unsur perbuatan pidana terdapat tiga unsur yaitu :

a. Unsur Undang-Undang dan yang di Luar Undang-Undang

Suatu perbuatan yang memuat dalam rumusan delik dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal-pasal yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut sedangkan yang diuar

³⁵Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana II*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

undang-undang. Suatu perbuatan tidak tertulis dalam undang-undang tetapi dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan itu melanggar norma-norma yang berlaku dalam hukum adat Untuk itu, diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

b. Sifat Melawan hukum atau Kesalahan sebagai Unsur Undang-Undang

Lain halnya jika perbuatan yang ditetapkan oleh ketentuan pidana biasanya sah dan tidak sahnya merupakan perkecualian. Hanya perkecualian itulah yang patut dipidana. Sebagai contoh adalah daya paksa. seorang yang tangannya tiba-tiba dipegang oleh orang lain lalu dipukulkan pada kaca jendela hingga pecah, maka orang yang tangannya dipukulkan itu tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP karena terdapat daya paksa absolut.

Daya paksa absolut dan daya paksa relatif termasuk alasan yang meniadakan unsur kesalahan dan digolongkan sebagai alasan pemaaf. Daya paksa absolut adalah daya paksa yang mana pelakunya dalam hal ini sama sekali tidak dapat dilakukan penahanan. Daya paksa ini terjadi baik secara fisik dan dapat pula

secara psikis, Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas.

c. Unsur Tertulis dari Rumusan Delik atau Alasan Penghapusan Pidana

Dalam suatu ketentuan pidana, pembentukan undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja. Kadang-kadang ditambahkan dengan penyebutan keadaan dimana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi, pembentuk undang-undang menambahkan alasan penghapusan pidana ini hanya dapat digunakan kalau perbuatan itu telah dilakukan dan kalau terjadi keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapusan pidana tersebut. Sebagai contoh, pasal 310 KUHP menyebutkan bahwa: *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”*.³⁶

Van Hamel mengartikan 3 perbuatan “*feit*”, yaitu:

- a. Perbuatan (*feit*) terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilaksanakan pula penuntutan salah satu perbuatan itu.

³⁶ Angky Anggriawan Setia Irdhana, Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu, Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2012, hlm.17.

- b. Perbuatan (*feit*) merupakan yang didakwakan ini terlalu sempit misalnya seseorang yang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, ternyata sengaja melakukan sebuah pembunuhan berarti masih bisa dapat dilakukan penuntutan atas dasar (sengaja melakukan pembunuhan) karena hal ini lain dari pada (penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Van hamel tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini
- c. Perbuatan (*feit*) merupakan perbuatan yang material, perbuatan ini terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpastian yang ada pada kedua pengertian sebelumnya dapat dihindari.³⁷

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku kejahatan bukan hanya sekedar karena pelaku tersebut telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outwardconduct*) sehingga harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum (Jaksa). Dan hukum pidana perbuatan yang bersifat lahiriah tersebut dikenal dengan istilah *actusreus*, sehingga memposisikan *actusreus* adalah elemen luar (*eksternal element*). Simon memandang sedikit berbeda dalam menentukan semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur

³⁷ Abidin Zainal, *Hukum Pidana*, Tangerang: Unpam Press, 2019, hlm.1.

tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (pertanggungjawaban pidana).

Kemudian Simon menyebut unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam unsur-unsur yang dikemukakan oleh Simon yaitu mengenai unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Dari beberapa unsur-unsur yang telah dijabarkan menurut Moeljatno dan Van Hamel dapat dipahami bahwa sebagai pertimbangan dalam hukum pidana mengenai teori-teori yang terkandung untuk memperindahkan akibat yang oleh hukum, dilanggar dengan ancaman hukuman yang dijadikan titik utama dari pengertian unsur-unsur tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat ini dan juga waktu yang terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama.
- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communiad* dan tindak pidanapropia.
- g. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak yang diperberatkan dan tindak pidana yang diperingan.³⁸

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, bandung: Alumni, 1983, hlm. 28.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Uang Palsu

1. Pengertian Pemalsuan Uang

Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan. Pemalsuan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu. Sedangkan uang adalah alat penukaran atau standar pengukuran nilai (kesatuan hitungan) yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang berupa kertas, emas, perak, logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Kemudian dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (2) bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

Mengenai definisi uang, Van Hove merumuskan bahwa pengertian uang adalah suatu benda yang dipergunakan dan diterima secara umum sebagai alat untuk penukaran dan standar pengukur nilai, standar daya beli dan standar utang piutang.³⁹ Terkait definisi di atas merupakan definisi yang fungsional, yang mana mata uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsional tertentu. lebih lanjut tentang definisi uang rupiah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. uang secara

³⁹*Ibid*, hlm. 25.

umum didefinisikan sebagai alat tukar menukar yang dapat diterima secara umum.⁴⁰

Mengenai uang dalam penelitian ini tentang uang palsu, uang palsu merupakan berupapenyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu tentang ciri-ciri uang asli saat sedang bertransaksi dengan orang lain. Sifat strategis tersebut dapat dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi seseorang (pelaku) untuk menjatuhkan suatu perekonomian negara.

Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu: Pembuatan Uang Palsu sebagaimana diatur dalam pasal 244 KUHP dan Pengedaran Uang Palsu sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP. agar keberadaan uang dapat terjamin maka harus dilakukan dengan upaya secara preventif dan represif.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 47.

⁴¹*Ibid*, hlm.49.

2. Fungsi Uang

Dari segi fungsinya dibedakan menjadi 2 macam fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli uang terdapat 3 macam fungsi yaitu:

- a. Sebagai alat tukar, karena uang dapat untuk mempermudah alat penukaran sebagai pengganti penukaran barang atau bisa disebut juga sebagai barter antara barang dengan barang.
- b. Sebagai satuan hitung, karena uang dapat ditunjukkan untuk menentukan nilai berbagai macam barang dan jasa yang dapat diperjual belikan atau ditawarkan, uang juga ditunjukkan untuk menentukan nilai harga barang dan jasa.
- c. Sebagai penyimpan nilai, karena dapat mengalihkan daya beli dari masa kemasa mendatang

Sedangkan untuk fungsi turunan antara lain uang berfungsi:

- a. Sebagai alat pembayaran yang sah, karena kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi jika menggunakan barter sebagai alat tukar menukar.
- b. Sebagai alat pembayaran utang, karena uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai alat penimbun kekayaan, karena biasanya seseorang tidak semua untuk menghabiskan uang untuk kebutuhan

konsumtif. Maka diperlukan untuk menyisihkan uang dengan menabung.

- d. Sebagai alat pemindah kekayaan, karena seseorang yang hendak pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya berupa tanah dan bangunan rumah kedalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah lamanya.
- e. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, apabila uang dalam keadaan stabil biasanya orang akan bergairah untuk melakukan investasi sebagai pendorong peningkatan perekonomian.⁴²

3. Jenis dan Bentuk Uang

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*counterfeiting*). Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana. Pemalsuan jenis peniruan yang dapat menjadi jenis-jenis kurang berbahaya dan berbahaya, sebagai berikut:

- a. Jenis yang kurang berbahaya, yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya

⁴² Agus Rijal, Abu Yusuf, *Landasan Teori*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2013, hlm.11.

dengan yang asli, pembuatannya dilakukan satu-persatu (kuantitas produksinya rendah).

- 1) Lukisan Tangan. Peniru dilakukan dengan cara melukis dengan bahan antara lain cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapi dan mudah terdeteksi.
 - 2) Fotokopi hitam putih. Pemalsuan dengan alat fotolopi hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis relief dan garis halus terputus-putus atau tidak jelas. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan menggunakan cat air.
 - 3) Cetakan kasa/sablon. Proses ini memerlukan alat fotografi untuk memisahkan warna-warna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa(screen) misal nilon.
- b. Jenis berbahaya, yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas baik, mendeteksi sempurna dan sulit dibedakan dengan yang asli jikadideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi.
- 1) Proses *photomechanic* (fotografi). Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya.

- 2) Proses *colourseparation*. Pemisahan warna dilakukan dengan filter pada kamera bagi masing-masing warna proses (*cyan, magenta, yellow dan black*). Penomoran dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas.
- 3) Proses *multi-colour*. Pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuaidengan jumlah warna secara berurutan. Unsur pengamanan yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru dengan proses ini. Reproduksi dengan proses *multi-colour* relatif memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan *colourseparation*. Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi-colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya.
- 4) Fotokopi berwarna. Kemajuan teknologi fotokopi berwarna berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar yang dikenal sebagai warna *cyan, magenta, yellow dan black*.

Berdasarkan Penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pemalsuan uang tidak selalu identik dengan uang palsu, dimana dibuat dengan menggunakan peralatan yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Sedangkan untuk pemalsuan uang yang berbahaya dimana pemalsuan dilakukan dengan peralatan yang modern sehingga masyarakat akan sulit mengenalinya. Pada umumnya, cara pendeteksian uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar *ultraviolet* secara manual.

Alattersebut cukup baik dan mudah untuk mendeteksi uang palsu namun faktor “*human error*” seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya untuk jumlah yang sedikit, selain itu dalam jumlah banyak akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pendeteksian dengan cara ini relatif subjektif, dan dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar *ultraviolet*.⁴³

4. Kelemahan Uang Palsu

Kelemahan yang diinformasikan berdasarkan temuan Bank Indonesia pada uang kertas rupiah palsu terdapat ciri-ciri uang kertas palsu antara lain:

a. Lukisan tangan

Ciri-ciri ini menggunakan cara Lukisan tangan sangat mengandalkan kemampuan melukis pada kertas dengan

⁴³ Dewanto Hajunowibowo, *Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet*, Solo: Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 343.

mencontoh gambar pada uang kertas asli namun ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna.

b. Pemindahan Warna

Jenis pemalsuan ini dengan cara memindahkan gambar pada uang asli ke kertas lain dengan cara pengepresan. Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak menjadi lunak dan gambarnya bisa dipindahkan ke kertas lain. Selanjutnya uang asli dibelah menjadi dua bagian dan masing-masing ditempelkan dengan kertas hasil proses pemindahan gambar cetakan uang tersebut. Namun kertas yang digunakan kualitasnya sangat rendah dan memudar apabila dicek menggunakan sinar ultra-violet dan warna tinta yang dicetak akan mengalami perubahan warna ketika uang tersebut beredar. Jadi dapat dipahami inilah sebuah ciri-ciri kelemahan uang palsu dibandingkan dengan uang asli.

c. Cetak Sablon

Cetak Sablon adalah sebuah teknik untuk mencetak tinta diatas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Dengan bantuan *screensablon* dan raket sablon dalam proses pengerjaannya. Jenis pemalsuan uang dengan cara cetak sablon dilakukan pada kertas berwarna putih.

d. Cetak Datar

Cetak datar atau biasa disebut offset adalah teknik cetak dimana bagian yang mencetak kedudukannya sama datar dengan bagian yang tak mencetak. Jenis pemalsuan dengan menggunakan jenis cetak *offset* seperti percetakan pada sebuah majalah.

e. Fotokopi Berwarna

Jenis pemalsuan dengan cara menggunakan mesin fotocopy berwarna yang canggih. Namun demikian, pengadaan mesin fotokopi berwarna tersebut sangat sulit karena harus memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang.

f. Alat Penyalin Gambar

Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Fungsi *scanner* ini mirip seperti mesin *fotocopy*, perbedaannya adalah mesin *fotocopy* hasilnya dapat dilihat pada kertas sedangkan *scanner* hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu sehingga kita dapat melakukan perbaikan dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar.

g. Separasi Pecah Warna

Pemalsuan dengan cara teknik cetak fotografi melalui proses pemisahan warna. Warna-warna yang asli dari uang kertas asli diperoleh dari penggabungan 3 warna pokok yaitu biru,

merah dan kuning serta penggunaan warna hitam untuk kesempurnaan atau kontras hasil cetakan.⁴⁴

D. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Uang merupakan simbol yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisadibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi.

Yuliadi menjelaskan definisi uang menurut hukum yaitu: “Sesuatu benda atau alat yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.”

Berbicara mengenai unsur kesengajaan kini dapat dipahami apa yang telah dilakukan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam membuat atau memalsukan uang asli tentunya memiliki tujuan yang bersifat melawan hukum yaitu untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli. adapun peraturan mengenai meniru atau memalsukan mata uang dalam pasal 244 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi:”*barangsiapa yang*

⁴⁴*Ibid.* hlm.74.

dengan sengaja memalsukan mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang tersebut yang seolah-olah uang asli dapat dipidana penjara maksimal lima belas tahun”.

Maksud dari pasal 244 tentang pelaku dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu bahwa si pelaku mempunyai tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. “maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran dari pelaku, belum berarti sudah beredar”.

Pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat. Konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang siapapun orang yang mempunyai niat untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tidak hak bagi seseorang itu, namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk

meniru atau memalsu uang, kecuali tidak bermaksud untuk diedarkan sebagai yang asli misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

Uang yang dimaksud dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah *“suatu benda yang dibuat sedemikian rupa sebagai alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya, ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, alumunium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya. Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu lembaga yaitu melalui bank”*.

Di Indonesia pembuatan uang di percayakan kepada Bank pemerintahan, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi *“setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.

menurut Teguh Prasetyo adalah: tindak pidana pemalsuan uang adalah “Kejahatan yang memuat suatu sistem yang tidak benar atau palsu yang

tampak dari luarnya. Tetapi ternyata bertentangan dengan kebenarannya yang disebut dengan pidana perbuatan pemalsuan bentuk (kejahatan dan kejahatan)”. berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan pemalsuan adalah tindak pidana mencari kebenaran dari fakta dan memalsukan sistem agar tampak seperti produk asli dan membahayakan masyarakat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa: *“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol Negara”*. *“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”*.

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang dicetak atau di buat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikatan tertentu dengan tujuan mata uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalampasal 245 KUHP yang berbunyi: *“barang siapa yang sengaja mengedarkan mata uang yang dikeluarkan oleh bank sebagai mata uang asli,*

padahal ditiru atau dipalsukan sendiri, ataupun barang siapa yang menyimpan keindonesia, mata uang dan uang kertas dengan maksud menyuruh mengedarkan sebagai mata uang asli, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan pasal 245 KUHP di atas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang meliputi :

- a. Melarang seseorang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang seolah-olah dipalsukan sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang kertas tersebut ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
- b. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di ketahuinya sebagai uang palsu, dengan sengaja mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
- c. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu , yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
- d. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank

yang waktu di terimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

Ketentuan lainnya adalah pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah di kurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan keIndonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”. Subyek serta unsur-unsur yang terdapat pada pasal 247 tersebut sama yang terdapat pada pasal 245. Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali.

Apabila ia menyatakan bahwa ia baru menyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan lalu mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “*Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada pasal*

245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah ”.

Sama halnya dengan kejahatan memalsukan uang, kejahatan mengedarkan uang palsu juga terdapat ketentuan yang mengatur diluar undang-undang, Ketentuan lain yang mengatur tentang pengedaran uang palsu yaitu terdapat pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi *“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”*.⁴⁵

⁴⁵ Jofra Pratama Putra, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*, Yogyakarta: Program studi ilmu hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011, hlm. 22.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Di Wilayah Polres Tegal Kota.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik yang sudah ditangani pihak kepolisian maupun yang belum ditangani pihak kepolisian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan uang

Data kasus uang palsu 5 tahun terakhir

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Crime Total	-	1	1	1	-
2.	Jumlah tersangka	-	1	3	2	-
3.	Jumlah barang bukti -Upal Rp.	-	1 lembar	723 lembar	-16 lembar	-

Pada tabel diatas kasus yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian terdapat 2 kasus antara 2018 dan 2019 untuk lebih rincinya sebagai berikut.

- a. kronologinya pada tahun 2018, hari selasa, tanggal 6 Februari 2018, pukul 08.30 bertempat di Jl. Jalingkut Kelurahan Tegalsari, Kecamatan

Tegal Barat, kota tegal. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap satu orang pelaku pengedar. Dari pengembangan ini, polisi membekuk dua orang lagi pada keesokan harinya. Dari ketiga tersangka tersebut diantaranya merupakan residive dengan kasus yang sama. Pelaku yang pertama ditangkap yaitu, suryani, warga tegal. pelaku tersebut ditangkap saat melintas di jalingkut daerah tegalsari, hasil perkembangan ini penyidik menangkap dua pelaku yang bernama Turiah dan Achmad sodikin warga batang kedua pelaku tersebut ditangkap diwilayah Purbalingga. dari penangkapan tersebut penyidik berhasil mengamankan uang palsu sebanyak 723 lembar dengan uang pecahan Rp. 100.000.00,-ribu rupiah.

alasan pelaku melakukan perbuatan ini secara berulang-ulangkali karena merasa tergiur dengan keuntungan yang banyak. Atas perbuatan dari pelaku tersebut maka dijerat dengan pelanggaran pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁶.

- b. Kronologinya, pada hari Selasa Tanggal 19 Februari Tahun 2019 yang bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Mangkusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Berawal dari dua orang pelaku pengedaran uang palsu ditanggap saat melakukan transaksi dengan berbelanja

⁴⁶Wawancara dengan Aiptu kusmanto, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal Kota, Tanggal 24 Maret 2021 Jam 11.20-14.00 WIB

disebuah pasar tradisonal di pasar pagi tegal kota, para tersangka mengakui sebelumnya juga pernah berbelanja di pasar pagi. Dari situlah para pedagang merasa curiga dengan uang palsu tersebut lalu melapor kepada penyidik, lalu penyidik melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap pelaku bernama senari warga kota tegal, dengan ditemukan barang bukti 16 lembar dengan uang pecahan Rp. 100.000.00,-ribu rupiah dari keterangan pelaku bahwa uang palsu tersebut berasal dari magelang tidak lama lagi akhirnya meringkus sukoco .

Dari keduanya polisi menyita sebanyak 16 lembar uang palsu. Akibat perbuatannya maka pelaku dikenakan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁷.

Sedangkan kasus yang belum ditangani pihak kepolisian terdapat 1 kasus pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut

1. Kronologinya, pada tahun 2017 yang bertempat di sebuah pasar tradisional yaitu pasar langon berdasarkan penelitian penulis dengan diawali pelaku berbelanja menggunakan uang palsu secara berulang ulangkali sampai masyarakat merasa curiga dengan keberadaan orang tersebut berdasarkan dari gerak gerik pelaku dan akhirnya masyarakat

⁴⁷Wawancara dengan Aiptu kusmanto, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal Kota, Tanggal 24 Maret 2021 Jam 11.20-14.00 WIB

langsung melaporkan kepada kepala pasarnya. Namun kasus ini belum diselesaikan pihak kepolisian. dengan beralasan masyarakat tidak ingin terlalu ribet dalam berurusan dengan hukum dan ditambahnya dengan barang buktinya sangat minim yaitu hanya 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000.00,- ribu rupiah.⁴⁸

Mengenai kasus tersebut maka Polres memberikan upaya untuk mencegah dan menertibkan masyarakat agar tidak ada lagi kekhawatiran sehingga ada rasa kepastian hukum. dalam hal ini Ada 2 (dua) upaya penanggulangan tindak pidana rupiah palsu yang ditangani oleh Polres selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia yaitu :

1. Upaya preventif

- a. Membentuk tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana rupiah palsu yang biasanya marak menjelang lebaran. untuk mengantisipasi beredarnya rupiah palsu di tempat-tempat keramaian.
- b. Mengedukasi masyarakat supaya berhati-hati dalam menukarkan rupiah.
- c. Uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar para oknum yang tidak bertanggung jawab sulit untuk memalsukan. Untuk itu,

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Untung Susanto, selaku kepala pasar langon diTegal Kota, tanggal 24 Februari 2021 12.31- 13. WIB

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk mencetak uang, harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan selama tahap produksinya sehingga, uang yang dihasilkan adalah uang yang sangat sulit untuk dipalsukan. Usaha pencetakan uang dengan carayang secanggih mungkin misalnya:

- a) Pemilihan bahan kertas uang yang tepat. Kertas yang digunakan harus memenuhi standart yang telah ditentukan, misalnya kertas harus tipis dan memiliki daya tahan yang tinggi, sehingga tidak mudah kusut dan sobek. Segi-segi pengamanan terhadap kertas tersebut juga harus diperhatikan, seperti serat-serat berwarna, benang pengaman dan tanda air.
- b) Pemilihan warna, yang artinya kombinasi warna yang akan digunakan harus bisa menyulitkan orang lain untuk memalsukannya.
- c) Pembuatan nomor-nomor jebakan dalam suatu design yang sangat sulit untuk dipahami oleh para pemalsu dan potensial.
- d. Uang asli yang dibuat dengan cara secanggih mungkin ini pada akhirnya akan diedarkan keseluruh masyarakat. Masa-masa peredaran yang lama dan setiap saat berpindah tangan dari satu

tangan ke tangan lain, sehingga tidak menutup kemungkinan uang tersebut kotor yang akhirnya menjadi lesuh dan kusut. Uang yang lesuh dan kotor ini akan sulit untuk dilihat secara awam keahliannya. Untuk itu, perlu dilakukan “cleanmoneypolicy” yaitu menarik dan memusnahkan uang yang tidak layak dengan mengeluarkan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB). Serta mengganti uang yang dimusnahkan dengan uang baru oleh Bank Indonesia.

- e. Masyarakat adalah korban dari kejahatan dari pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu. untuk itu perlu adanya informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli. Informasi ini sangat membantu masyarakat yang awam, khususnya bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan uang, misalnya para pekerja kasir toko, pedagang, kasir bank dan lainnya agar selalu waspada terhadap uang yang telah diterimanya.
- f. Menempatkan poster-poster di beberapa wilayah yang strategis, misalnya di area tepi jalan raya. poster tersebut berisi himbauan agar masyarakat berhati-hati terhadap tindak pidana rupiah palsu, selain itu masyarakat yang membutuhkan rupiah pecahan agar menukarkan rupiah yang dibutuhkan ke Bank. Spanduk tersebut juga berisi himbauan agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu untuk segera melapor ke polisi, hal tersebut merupakan upaya penting untuk mencegah rupiah palsu yang lain beredar di masyarakat luas.

Dengan adanya laporan masyarakat maka polisi akan mencari sumber pengedar dan pembuatnya.

- g. Pengawasan dan pengamanan oleh tim patroli langsung untuk mempersempit ruang gerak aksi tindak pidana rupiah palsu, yakni pengawasan dan pengamanan yang dilakukan di tempat-tempat transaksi yang menggunakan uang *cash*, yakni Bank tempat pertukaran uang terminal, pasar tradisional, tempat hiburan, serta pusat-pusat perbelanjaan masyarakat.⁴⁹

2. Upaya Represif

- a. Penyelidikan, yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang telah terjadi dalam kasus pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok dalam masyarakat. tidak terlepas bila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.
- b. Penindakan, yaitu melakukan upaya penegakkan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk strata apapun.
- c. Pengamanan di tempat pembuatan uang yang resmi atau melalui bank untuk mencegah adanya tindakan kriminal.
- d. Pengawasan dan deteksi di tempat pusat perdagangan dan perekonomian.

⁵¹Wawancara dengan Aiptu kusmanto, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal Kota, Tanggal 24 Maret 2021 Jam 11.20-14.00 WIB

- e. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang melapor tentang ditemukannya uang palsu⁵⁰.

Mata uang juga diperlukan sebagai alat fungsi pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional. pengaturan mata uang dalam Undang-Undang tersendiri menjadi pelindung ketertiban dan keamanan bertransaksi, mengingat mata uang dapat memfasilitasi semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, sampai distribusi. pengaturan mata uang memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bank Indonesia dalam mengatur penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah. oleh karena itu Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disahkan sebagai landasan hukum yang kokoh dalam pengelolaan dan pengendalian rupiah.

Ketentuan pidana mengenai kejahatan terhadap rupiah palsu diatur dalam pasal 33-41 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan, sehingga diharapkan mampu menekan terjadinya tindak pidana rupiah palsu. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ini pihak kepolisian yakni polres tegal kota melakukan berbagai upaya melalui upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana rupiah palsu di tegal kota tugas polisi mempunyai dua aspek penting, pertama aspek preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan

⁵²Wawancara dengan Aiptu kusmanto, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal Kota, Tanggal 24 Maret 2021 Jam 11.20-14.00 WIB

dan pelanggaran. tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum.

Polisilah yang pertama harus melakukan upaya yang bersifat preventif yaitu menghindarkan terjadinya gangguan keamanan, termasuk terhadap tindak pidana rupiah palsu dan pengedarannya. polisi harus selalu siap siaga dan dalam menjalankan tugasnya itu polisi harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui adanya peristiwa tindak pidana peredaran rupiah palsu. aspek kedua adalah aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan penegak hukum. Jadi apabila tidak diiringi dengan kedua upaya penanggulangan yaitu upaya preventif dan upaya represif maka bisa jadi banyak penemuan kasus-kasus jika tidak ada peran polisi dalam menghadapi pemberantasan uang palsu.

B. Kendala yang di Hadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang di Wilayah Polres Tegal Kota

Kendala yang dihadapi oleh penyidikan untuk memberantas tindak pidana pengedaran uang palsu adalah sulitnya untuk menemukan pelaku untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjeratkan pelaku tersebut. biasanya orang yang melakukan pemalsuan itu merupakan pendatang baru, oleh karena itu, pihak kepolisian belum bisa mengungkapkan yang membuat atau menyebarkan pertama kalinya uang palsu tersebut sehingga tidak bisa

ditindaklanjuti untuk proses di pengadilan. dari kasus kejahatan, pelaku pengedaran uang palsu, hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan terhadap pencetak dan pemalsuan uang nampaknya sebagian besar merupakan kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transional. yaitu, Pemalsuan terhadap mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh parah residivis, yang mana hal ini memungkinkan terjadi dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan. pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu pula biasanya, para pelaku kejahatan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki keahlian khusus.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian wawancara di Polres Tegal Kota menurut Anggota Satuan Reserse Kriminal, Aiptu Kusmanto diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana pengedaran uang palsu. sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, antara lain⁵² :

⁵¹Wawancara dengan Aiptu kusmanto, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal Kota, Tanggal 24 Maret 2021 Jam 11.20-14.00 WIB

⁵²Wawancara dengan Aiptu kusmanto, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal Kota, Tanggal 24 Maret 2021 Jam 11.20-14.00 WIB

- a. Masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu. kejahatan atau tindak pidana uang palsu selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, apalagi bila diingat bahwa pelaku tindak pidana ini sudah menggunakan berbagai alat teknologi yang semakin canggih, sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu yang pula didasarkan pada persepsi bahwa sulit untuk membedakan antara uang palsu dengan uang asli, tanpa menggunakan alat senter ultraviolet led atau kepekaan pada ciri-ciri fisik yang kurang dikuasai oleh masyarakat;
- b. Kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum. kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa yang menjadi korban kejahatan uang palsu sering kali cemas terhadap suatu reaksi personil peradilan pidana terhadap viktimisasi yang dialaminya;
- c. korban dari tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. dalam hal ini, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya korban tindak pidana uang palsu membawa konsekuensi yang mempunyai sindikat karena dalam proses penyidikan memakan waktu yang lama untuk melacak keberadaan pelaku-pelaku dalam membuat pemalsuan uang bahwa pelaku tidak dibebani hukuman atas dampak-dampak dari tindak pidana uang palsu yang diteloh diderita oleh para korban.
- d. Faktor Perekonomian, yang menjadi titik awal beredarnya uang palsu dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi

menengah kebawah dan rendahnya pendidikan. Adanya pendidikan yang rendah ini, menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum dimata masyarakat. sehingga terus saja memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu tanpa diketahui akibat yang timbul. dan semakin berputarnya roda kehidupan dibarengi dengan meningkatnya harga masing-masing kebutuhan yang tidak sedikit menyebabkan orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

- e. Faktor Lingkungan, faktor ini juga dapat mempengaruhi orang-orang untuk melakukan upaya tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan selalu berbuatjahat. sedangkan orang yang tidak memiliki jiwa kriminal, akan tetapi hidup dilingkungan orang jahat pasti akan terpengaruh dan akan melakukan kejahatan yang mana salah satunya untuk melakukan tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu.

Maka dari pada itu upaya yang dilakukan Polres Tegal Kota untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota masyarakat maupun anggota Polres Tegal Kota sendiri tentang pentingnya penegak hukum Tindak Pidana mengedarkan uang palsu.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kejaksaan, kehakiman, dan bank indonesia.

- c. Pengarahan personil khususnya serse kriminal (reskrim) pada daerah-daerah rawan peredaran uang palsu.

Langkah-langkah yang diambil kepolisian polres tegal kota dalam mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut. tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak terkait. Dalam hal ini yang paling penting akan kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan.⁵³

⁵³Wawancara dengan Aiptu kusmanto, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal Kota, Tanggal 24 Maret 2021 Jam 11.20-14.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis Polres Tegal Kota sudah berhasil menangani kasus pengedaran uang palsu sehingga tidak ada lagi penemuan kasus baru lagi. dan bagi masyarakat apabila menemukan uang palsu diharapkan untuk tidak perlu takut melapor, karena itu merupakan tugas wewenang dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. terhadap pelaku pengedaran uang palsu berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini bertujuan agar penangkapan dan penahanan tersangka terbukti benar adanya dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Polres Tegal Kota sulitnya untuk memberantas pengedaran uang palsu yang berasal dari luar kota karena mereka yang melakukan kejahatan ini merupakan pendatang baru dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi tindak pidana pengedaran uang palsu: (1) masyarakat kurang konstruktif dalam merespon uang palsu (2) kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum (3) dan sulit bagi pihak kepolisian, kurangnya

bagi saksi-saksi yang melihat untuk segera melapor kepada pihak berwajib untuk segera ditangani (4) korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu (5) faktor perekonomian (6) faktor lingkungan. sehingga upaya yang dilakukan melalui tindakan :preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen terkhusus Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas tunggal dalam pencetakan uang negara,kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. melalui tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. dan sulit bagi pihak kepolisian, kurangnya bagi saksi-saksi yang melihat untuk segera melapor kepada pihak berwajib untuk segera ditangani.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya suatu perkara tindak pidana pengedaran uang palsu, sangat diperlukan peran penegak hukum untuk melindungi korban sebagai tindak pidana pengedaran uang palsu sehingga para korban tidak merasa takut untuk melaporkan adanya penemuan uang palsu yang diterima.
2. Di harapkan untuk mengatasi kendala kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana peredaran uang palsu tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dan adanya koordinasi antara instansi.

Daftar Pustaka

Buku

Agus, Rijal, *Landasan Teori*, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013a.

Chazawi, Adam, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002a.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, Cet Pertama, 2020b.

Irdhana Setya Anggriawan Angky, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Uang Rupiah Palsu*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2012.

Iswardono S.P., *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Sofyan, Andi, Asiza Nur, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, Cet Ke-1, 2016.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, Cet Pertama, 2018.

Warsito, Utomo Hadi, *hukum kepolisian*, Jakarta: prestasi pustaka, Cet Ke-1, 2005.

Wijayanto, Arif Agus, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Semarang: Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA, 2017.

Zainal, alifiandri Ayu, *Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 Dan 245 KUHP*, Makasar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015..

Ashshoka Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ritonga Rozak Khairul, *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetakan dan Pengedaran Uang Palsu*, Medan: Program studi hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

Hajunowibowo Dewanto, *Perangkat Pendeteksi Uang Palsu Berbasis LVQ Memanfaatkan Ultraviolet*, Solo: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Sofyan Muhammad Andi, Azis Abd, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Balebat Dedikasi Prima, 2014.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Tangerang: Unpam Press, 2019.

Oscar David, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Jurnal

Astini, Dewi, Sari Miranda, “*Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*”. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* Volume 7, Nomor 3 2019.

Sipayung, Ronald F. C. , Syahrin Alvi , Suhaidi, Mulyadi Mahmud, “*Analisis yuridis peran polri dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang terkait dengan undang-undang no. 7 tahun 2011*”, *USU Law Journal*, Volume 4, Nomor 3 2016.

Putro, Hariyanto pandega Bagas, Soponyono Eko, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015.

Putra, Pratama Jofra, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*, Yogyakarta: Fakultas ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta, 2011.

PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian

Wawancara

Wawancara dengan Aiptu kusmanto, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tegal, Hari Rabu 24 Maret 2021, bertempat di Polres Tegal.

Wawancara dengan Maskuri, Kepala Pasar Pagi, Hari Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Tegal.

Wawancara dengan Untung Susanto, Kepala Pasar Pagi, Hari Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Tegal.

Website

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, pukul 10.50 WIB.

<http://HukumOnline.com/hg/narasi/2014/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. Diakses pada tanggal 1 agustus 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/> diakses, Kamis, Juli 2021, Pukul 18.36 WIB.

Lampiran

1. Wawancara Dengan Kepala Pasar Randu Gunting



2. Wawancara Dengan Kepala Pasar Kejambon



3. Wawancara Dengan Kepala Pasar Pagi



4. Wawancara dengan Satuan Reserse Kriminal



5. Surat Hasil Penelitian Polres Tegal kota.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEGAL KOTA
Jalan Pemuda 2, Tegal 52111


SURAT KETERANGAN
Nomor : S.KET/42 /III/2021/Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYUAIB ABDULLAH, S.I.K
Pangkat / NRP : AJUN KOMISARIS POLISI / 89110548
Jabatan : KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Kesatuan : POLRES TEGAL KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : MELATI NUR KHAYATI
Tempat, Tanggal Lahir : -
Alamat : Desa Kesadikan Rt. 10 Rw. 01 Kec. Tarub Kab. Tegal
NIM : 5117500076
Prodi / Fakultas : S1 Ilmu Hukum / Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Terhitung mulai tanggal 24 Februari s.d 03 Maret 2021 yang bersangkutan melaksanakan Riset tentang Upaya Kepolisian Kota Tegal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu di Satreskrim Polres Tegal Kota.

Tegal, 15 Maret 2021
a.n. Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota
SAT RESKRIM


SYUAIB ABDULLAH, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI / NRP 89110548

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Melati Nur Khayati

NPM 5117500076

Tempat/Tanggal Lahir: Tegal, 31 Desember 1998

Program Studi : ilmu hukum

Alamat : Desa Kesadik Rt10/01 Kec. Tarub, Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan:

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SDN Kesamiran 01	2006	2011
2.	SMP N 01 Tarub	2011	2014
3.	SMK Nu 1 Islamiyah kramat	2014	2017
4.	Universitas Pancasakti Tegal	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2021

Hormat saya,

Melati Nur Khayati